

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Perilaku Pemilih

1. Pengertian Perilaku Pemilih

Pada umumnya perilaku politik ditentukan oleh faktor internal dan individu itu sendiri seperti idealisme, tingkat kecerdasan, kehendak hati dan oleh faktor eksternal (kondisi lingkungan) seperti kehidupan beragama, sosial, politik, ekonomi, dan lain sebagainya. Perilaku politik menurut Sudiono Sastroatmodjo (1995: 3) adalah :

“Perilaku politik merupakan perilaku yang menyangkut persoalan politik, perilaku politik berkenaan dengan tujuan suatu masyarakat, kebijakan untuk mencapai suatu tujuan, serta sistem kekuasaan yang memungkinkan adanya suatu otoritas untuk mengatur kehidupan masyarakat ke arah pencapaian tujuan tersebut. Perilaku politik yang ditunjukkan oleh individu merupakan hasil pengaruh beberapa faktor, baik faktor internal maupun faktor eksternal, yang menyangkut lingkungan alam maupun sosial budaya”.

Oleh karena itu perilaku politik merupakan tindakan masyarakat atau pemerintah yang berkaitan dengan kepentingan atau pencapaian tujuan terkait keputusan politik baik dalam proses pembuatan maupun pelaksanaannya. Sebagai insan politik setiap warga negara tentunya melakukan tindakan politik, yang dalam penelitian ini lebih difokuskan pada perilaku pemilih yang juga merupakan bagian dari perilaku politik.

Sementara itu perilaku pemilih dalam hal ini diartikan oleh J. Kristiadi (1996 : 76) sebagai suatu keterikatan seseorang untuk memberikan suara dalam proses pemilihan umum berdasarkan psikologis, faktor sosiologis dan faktor rasionalitas si pemilih atau disebut dengan teori *Voting Behaviour*.

Berdasarkan uraian di atas dapat dikatakan bahwa perilaku adalah suatu tindakan yang dilakukan seseorang yang terbentuk dari perwujudan suatu sikap. Maka disini disimpulkan bahwa perilaku pemilih adalah sejauh mana seseorang untuk bertindak atau melakukan tindakan yang berkaitan dengan politik, dalam hal ini yaitu penggunaan hak suara pada suatu pemilihan umum. Perilaku pemilih timbul dari isu-isu dan kebijakan-kebijakan politik yang menjadi faktor seseorang memiliki pilihan politik yang berbeda satu sama lain. Faktor-faktor yang mempengaruhi pilihan politik ditentukan oleh faktor internal dan juga faktor eksternal.

2. Pendekatan Perilaku Pemilih

Terdapat beberapa pendekatan yang bisa digunakan untuk memahami perilaku pemilih, Ramlan Surbakti (1999: 145) menyatakan bahwa terdapat beberapa pendekatan yang bisa digunakan dalam mengkaji perilaku pemilih diantaranya:

1. Pendekatan struktural yang melihat kegiatan memilih sebagai produk dari konteks struktur yang lebih luas, seperti struktur sosial, sistem

partai, sistem pemilihan umum, permasalahan, dan program yang ditonjolkan oleh setiap partai.

2. Pendekatan sosiologis yang cenderung menempatkan kegiatan memilih dalam kaitan dengan konteks sosial. Konkretnya pilihan seseorang dalam pemilihan umum dipengaruhi oleh latar belakang demografi dan sosial ekonomi seperti jenis kelamin, tempat tinggal, pekerjaan, pendidikan kelas, pendapatan dan agama.
3. Pendekatan ekologis yang hanya relevan jika dalam suatu daerah pemilihan terdapat perbedaan karakteristik pemilih berdasarkan unit teritorial seperti desa, kelurahan, kecamatan dan kabupaten.
4. Pendekatan psikologi mengacu pada konsep yang digunakan untuk menjelaskan perilaku untuk memilih pada pemilihan umum berupa identifikasi partai. Konsep ini merujuk pada persepsi pemilih atas partai-partai yang ada atau keterikatan emosional pemilih terhadap partai tertentu. Konkretnya partai yang secara emosional dirasakan sangat dekat dengannya merupakan partai yang selalu dipilih tanpa dipengaruhi oleh faktor-faktor lain.
5. Pendekatan Pilihan Rasional yang melihat kegiatan memilih merupakan produk kalkulasi untung dan rugi. Yang dipertimbangkan tidak hanya “ongkos” memilih dan kemungkinan suaranya dapat mempengaruhi hasil yang diharapkan, tetapi juga perbedaan dari alternatif berupa pilihan yang ada.

Pendekatan untuk melihat perilaku pemilih juga dikemukakan oleh Adman Nursal (2004 : 54), secara umum terbagi atas empat pendekatan yakni pendekatan sosiologis (Mazhab Columbia), pendekatan psikologis (Mazhab Michigan) dan pendekatan rasional serta pendekatan domain kognitif (pendekatan *marketing*).

1. Pendekatan Sosiologis (Mazhab Columbia)

Pendekatan sosiologis menjelaskan, karakteristik dan pengelompokan sosial merupakan faktor yang mempengaruhi perilaku pemilih dan pemberian suara pada hakikatnya adalah pengalaman kelompok.

Asfar dalam Adman Nursal (2004 : 55) mengungkapkan model ini dikenal sebagai model perilaku pemilih Mazhab Columbia. Cikal-bakalnya berasal dari Eropa. Menurut Mazhab Columbia, pendekatan sosiologis pada dasarnya menjelaskan bahwa karakteristik sosial dan pengelompokan sosial - usia, jenis kelamin, agama, pekerjaan, latar belakang keluarga, kegiatan-kegiatan dalam kelompok formal dan informal dan lainnya – mempunyai pengaruh yang cukup signifikan dalam pembentukan perilaku pemilih.

Kelompok-kelompok sosial itu memiliki peranan besar dalam membentuk sikap, persepsi dan orientasi seseorang. Menurut Bone dan Ranney dalam Nursal (2004 : 56), ada tiga tipe utama pengelompokan sosial :

1. Kelompok kategorial
Kelompok kategorial terdiri dari orang-orang yang memiliki satu atau beberapa karakter khas, tetapi tidak mengorganisasikan aktivitas politik dan tidak menyadari identifikasi dan tujuan kelompok. Pengelompokan kategorial terbentuk berdasarkan faktor-faktor seperti perbedaan jenis kelamin, perbedaan usia, dan perbedaan pendidikan.
2. Kelompok sekunder
Kelompok sekunder terdiri dari orang-orang yang memiliki ciri yang sama yang menyadari tujuan dan identifikasi kelompoknya, dan bahkan sebagian membentuk organisasi untuk memajukan kepentingan kelompoknya. Kelompok sekunder dapat diklasifikasikan berdasarkan pekerjaan, status sosio ekonomi dan kelas sosial, serta kelompok-kelompok etnis yang meliputi ras, agama, dan daerah asal.
3. Kelompok primer
Kelompok primer terdiri dari orang-orang yang sering dan secara teratur melakukan kontak dan interaksi langsung. Yang termasuk kedalam kelompok primer adalah pasangan suami isteri, orangtua dan anak, serta kelompok bermain (*peer groups*).

2. Pendekatan Psikologis (Mazhab Michigan)

Menurut Adman Nursal (2004 : 59) mazhab ini menggarisbawahi adanya sikap politik para pemberi suara yang menetap, teori ini dilandasi oleh sikap dan sosialisasi. Sikap seseorang sangat mempengaruhi perilaku politiknya. Sikap itu terbentuk melalui sosialisasi yang berlangsung lama, bahkan bisa jadi sejak seorang pemilih masih berusia dini. Pada usia dini, seorang calon pemilih telah menerima pengaruh politik dari orangtuanya, baik dari komunikasi langsung ataupun dari pandangan politik yang diekspresikan orangtuanya. Sikap tersebut menjadi lebih mantap ketika menghadapi pengaruh berbagai kelompok acuan seperti pekerjaan, kelompok pengajian, dan sebagainya.

Pada dasarnya pendekatan psikologis ini adalah pendekatan yang melihat perilaku pemilih sebagai bentukan dari proses sosialisasi yang melahirkan ikatan emosional (identifikasi) yang mengarahkan tindakan politik seseorang dalam suatu pemilihan. Indikator yang digunakan untuk mengukur besarnya pengaruh pendekatan ini yaitu :

1. Ketokohan, dilihat dari perasaan emosional pemilih yang melandasi pilihannya dengan mempertimbangkan identitas atau ketokohan calon (atau tokoh dibelakang calon) dan tokoh-tokoh panutan yang dihormati oleh pemilih.
2. Identifikasi Partai, yang dilihat dari kesamaan pandangan responden dengan anggota keluarganya terhadap pilihan tertentu serta adanya kesamaan antara partai yang dipilih dengan partai yang dikagumi.
3. Pendekatan Rasional

Pendekatan rasional berkaitan dengan orientasi utama pemilih yaitu orientasi isu dan orientasi kandidat. Perilaku pemilih berorientasi isu berpusat pada siapa yang akan memerintah dan yang akan mampu mengatasi semua persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat. Sementara itu orientasi kandidat mengacu pada sikap seseorang terhadap pribadi kandidat.

Pengaruh isu dan kandidat itu antara lain berkaitan erat dengan peristiwa sosial, ekonomi, dan politik tertentu yang kontekstual dengan pemilu bersangkutan, terutama peristiwa dramatis. Sementara itu,

pendekatan rasional terhadap kandidat bisa didasarkan pada kedudukan, informasi, prestasi dan popularitas pribadi bersangkutan dalam berbagai bidang kehidupan seperti organisasi, kesenian, olahraga dan politik.

Pendekatan rasional lebih melihat kegiatan perilaku pemilih sebagai produk hitungan untung rugi. Pemilih rasional memiliki motivasi, prinsip, pengetahuan dan mendapat informasi-informasi yang cukup. Tindakan mereka didasarkan bukan karena faktor kebetulan atau kebiasaan dan bukan merupakan kepentingan pribadi, tetapi kepentingan umum berdasarkan pikiran dan pertimbangan yang logis.

Ciri-ciri pemilih rasional meliputi lima hal, yaitu sebagai berikut :

1. Dapat mengambil keputusan apabila dihadapkan pada alternatif.
2. Dapat membandingkan apakah sebuah alternatif lebih disukai, sama saja, atau lebih rendah dibandingkan alternatif lain.
3. Menyusun alternatif dengan cara transitif.
4. Memilih alternatif yang tingkat prefensifnya lebih tinggi.
5. Selalu mengambil keputusan yang sama apabila dihadapkan pada alternatif-alternatif yang sama.

4. Pendekatan Marketing

Menurut pendekatan yang dikembangkan oleh Newman dan Sheth dalam Adman Nursal (2004 : 69) terdapat tujuh domain kognitif terpisah dan berbeda yang mempengaruhi perilaku pemilih yakni :

- a. Isu dan kebijakan politik (*issues and policies*), merepresentasikan kebijakan atau program yang diperjuangkan

- dan dijanjikan oleh partai atau kandidat politik jika menang kelak.
- b. Citra sosial (*social imagery*), menunjukkan stereotif kandidat atau partai (citra kandidat atau partai di mata pemilih) untuk menarik pemilih dengan menciptakan asosiasi antara kandidat atau partai dengan segmen-segmen tertentu dalam masyarakat.
 - c. Perasaan emosional (*emotional feelings*), dimensi emosional yang terpancar dari kontestan yang ditunjukkan oleh kebijakan politik yang ditawarkan.
 - d. Citra kandidat (*candidate personality*), mengacu pada sifat-sifat pribadi yang penting yang dianggap sebagai karakter kandidat.
 - e. Peristiwa mutakhir (*current events*), mengacu pada himpunan peristiwa, isu, dan kebijakan yang berkembang menjelang dan selama kampanye.
 - f. Peristiwa personal (*personal events*), mengacu pada kehidupan pribadi dan peristiwa yang pernah dialami secara pribadi oleh seorang kandidat.
 - g. Faktor-faktor epistemik (*epistemic issues*), isu-isu pemilihan yang spesifik yang dapat memicu keingintahuan para pemilih tentang hal-hal baru.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat diketahui teori perilaku pemilih dibagi kedalam beberapa pendekatan, namun pada umumnya pendekatan tentang perilaku pemilih ini dibedakan kedalam tiga pendekatan besar yaitu pendekatan sosiologis, pendekatan psikologis dan pendekatan rasional. Ketiga pendekatan besar tersebut yang mana satu sama lain saling melengkapi dan saling terkait.

Berdasarkan keterangan sebelumnya maka dalam penelitian ini, peneliti menggunakan tiga pendekatan perilaku pemilih yang terdiri atas pendekatan sosiologis, pendekatan psikologis, dan pendekatan rasional. Ketiga pendekatan ini akan mengukur perilaku pemilih dalam pemilihan *peratin Pekon Rawas* Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2012. Hal ini dikarenakan pendekatannya harus disesuaikan dengan kondisi lokasi penelitian yang berada di pedesaan sehingga

tendensi memilih lebih mengarah pada ketiga pendekatan tersebut dan objek penelitian yakni pemilihan *peratin* atau setingkat kepala desa, dimana pendekatan *marketing* tidak begitu ditampakkan oleh kontestan mengingat ruang lingkupnya tidak terlalu luas.

3. Faktor yang Mempengaruhi Perilaku Pemilih

Berbicara tentang perilaku pemilih, perilaku pemilih itu bisa timbul dari isu-isu dan kebijakan-kebijakan politik yang menjadi faktor seseorang memiliki pilihan politik yang berbeda satu sama lain. Terdapat beberapa hal yang mempengaruhi perilaku pemilih di Indonesia. Seperti halnya orientasi pemilih yang terdiri atas beberapa faktor sebagaimana dijelaskan dalam Adman Nursal (2004 : 80) di bawah ini diantaranya adalah :

a. Orientasi agama

Agama merupakan salah satu faktor penting pembentukan perilaku pemilih di Indonesia. sejumlah penelitian menunjukkan bahwa *sosio religius* mempunyai korelasi nyata dengan perilaku pemilih. Dalam hal ini pemilih yang muslim cenderung partai islam dan begitu juga sebaliknya.

Disimpulkan bahwa mudarnya pengaruh politik aliran dalam perilaku pemilih di Indonesia dan perbedaan agama diantara pemilih mempunyai korelasi signifikan, walaupun lemah, terhadap perbedaan pemilihan partai.

b. Kelas sosial dan Kelompok sosial lainnya

Faktor kelas dapat dianggap penting oleh partai politik dan juga faktor sosial lainnya yang juga menjadi perhatian penting terkait pilihan politik adalah usia dan jenis kelamin. Studi-studi tentang faktor usia dan jenis kelamin terhadap perilaku pemilih sangat penting dilakukan. Jumlah wanita yang lebih lima puluh persen dari total populasi merupakan proporsi yang menentukan hasil pemilu jika terdapat korelasi yang erat antara jenis kelamin dan pola pilihan.

Sementara itu dipihak lain, para pemilih pemula khususnya boleh jadi mempunyai perilaku yang khas. Adanya tendensi para pemuda untuk tidak mengikuti arahan dan nasihat para pemimpin. Disatu sisi dapat diduga kaum muda memiliki kecenderungan melawan dan memberontak. Tetapi disisi lain, bisa jadi fenomena itu merupakan indikasi perubahan sosial.

c. Faktor kepemimpinan dan Ketokohan

Pemimpin dapat dibedakan menjadi pemimpin formal (resmi) dan pemimpin informal yang biasa disebut tokoh masyarakat, tokoh adat, dan tokoh agama. Garis kepemimpinan menjadi salah satu hal yang dapat menentukan pilihan seseorang dalam pemilihan langsung. Begitu juga halnya dengan ketokohan, karena masyarakat desa pada umumnya masih cenderung berorientasi paternalistik dan kurang mandiri dalam menentukan semua keputusan yang hendak diambilnya. Para pemilih

masih memandang para pemimpin sebagai figur yang harus dipatuhi dan dipanuti segala tindakan dan perilakunya.

d. Faktor identifikasi

Aspek identifikasi partai memberi pengaruh cukup kuat terhadap pilihan partai politik. Hal ini ditunjukkan oleh kesamaan pandangan responden dengan anggota keluarganya, hal lain yang mengindikasikan ini adalah adanya kesamaan antara partai yang dipilih dengan partai yang dikagumi. dalam era reformasi dimana yang dipilih dalam pemilihan umum adalah kandidat secara langsung, tidak terlalu memfokuskan pilihan pada partai, identifikasi menjadi faktor penting untuk memahami perilaku pemilih.

e. Orientasi isu

Faktor isu dan program memberi pengaruh signifikan terhadap perilaku pemilih, terutama pada pemilih kalkulatif. Disamping karena besarnya perhatian masyarakat terhadap persoalan yang dihadapi bangsa, yakni krisis total, strategisnya faktor isu disebabkan juga oleh kebebasan setiap partai politik mengemas isu dan programnya. Pada umumnya meningkatnya pendidikan atau daya kritis masyarakat merupakan faktor yang menyebabkan pentingnya peranan isu dan program.

f. Orientasi kandidat

Pada pemilihan langsung, calon yang berasal dari unit wilayah pemilihan bersangkutan, tentunya lebih dikenal oleh para pemilih. Faktor kandidat ini akan memberi pengaruh besar terhadap perilaku

pemilih dalam suatu pemilihan umum. Yaitu dalam hal ini dijelaskan beberapa pendekatan bahwa *social imagery* kandidat menjadi hal yang diperhitungkan oleh pemilih. Terutama didaerah pedesaan, bagi kandidat kepala desa, *personality candidat* juga menjadi hal yang penting sebagai referensi utama bagi pemilih.

g. Kaitan dengan peristiwa

Faktor lain yang tak bisa diabaikan adalah kaitan isu dan kandidat yang diajukan dengan peristiwa-peristiwa yang masih mempengaruhi pikiran para pemilih. Peristiwa-peristiwa lokal tertentu juga sangat mempengaruhi perilaku pemilih ditingkat lokal. Peristiwa-peristiwa lokal itu memiliki dimensi tertentu yang seringkali hanya dipahami oleh masyarakat lokal itu sendiri. Terutama dalam pemilihan kepala desa, hal-hal mendasar mengenai integritas desa, peristiwa yang menyentuh kepentingan dasar bagi suatu desa akan menjadi pertimbangan bagi masyarakat untuk memutuskan pilihan.

Berdasarkan penjelasan diatas disebutkan bahwa terdapat beberapa hal yang banyak mempengaruhi pemilih dalam memutuskan pilihan dalam pemilihan langsung di Indonesia. Beberapa aspek di atas seperti indikator kelas sosial dan pengelompokan sosial, indikator ketokohan, orientasi isu serta orientasi kandidat juga dapat ditemukan pada perilaku pemilih masyarakat terutama pemilih pemula pada pemilihan *peratin Pekon Rawas* tahun 2012.

B. Tinjauan Tentang Pemilih

1. Pengertian Pemilih

Menurut pasal 1 ayat (22) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disebutkan bahwa pemilih adalah Warga Negara Indonesia yang telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin.

Pemilih adalah Warga Negara Republik Indonesia yang melaksanakan Pemilihan pada hari dan tanggal pemungutan suara telah berusia sekurang-kurangnya 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin dan terdaftar dalam daftar pemilih tetap. (<http://id.shvoong.com>) di akses 27/03/2012/22.54.

Robert D. Putnam dalam Mas'ood (2003 : 87) memandang bahwa sistem politik terdiri dari lapisan-lapisan seperti halnya stratifikasi sosial dimana salah satu lapisannya disebut kaum pemilih (*voters*), lapisan ini dalam sistem stratifikasi politik di negara penganut demokrasi perwakilan adalah lapisan massa warga negara biasa yang hanya bisa mempengaruhi kehidupan politik nasional ketika diselenggarakan pemilihan umum.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pemilih adalah warga Negara Indonesia yang melaksanakan pemilihan yang pada hari pemilihan tersebut sekurang-kurangnya sudah cukup umur yaitu 17

(tujuh belas) tahun atau sudah pernah menikah dan yang terdaftar sebagai pemilih di daerah pemilihan.

Pemilih terbagi beberapa segmen atau tipe, yakni pemilih rasional, kritis, tradisional, dan skeptis (Firmanzah, 2008 : 119).

1. Pemilih rasional pada dasarnya menjadikan orientasi kandidat atau partai sebagai penentu dalam memutuskan pilihannya, dimana kemampuan dan program kerja yang ditawarkan, serta prestasi yang telah dicapai oleh kandidat atau partai yang diutamakan.
2. Pemilih kritis juga berorientasi pada kemampuan kandidat atau calon dalam mengatasi persoalan yang dihadapi masyarakat, namun masih mempertimbangkan ikatan ideologis yang menjadikannya loyal terhadap partai atau kandidat tertentu.
3. Pemilih tradisional yang menentukan pilihan berdasarkan kedekatan sosial budaya, nilai, asal-usul, agama, dan biasanya mengutamakan figur atau ketokohan, kepribadian dan nilai historis kandidat atau partai.
4. Pemilih skeptis yakni pemilih yang memiliki minat rendah terhadap politik secara umum atau mereka yang termasuk golongan putih (golput).

Sementara itu Newman dalam Nursal (2004 : 126) membagi pemilih berdasarkan perilaku dalam empat segmen, yaitu :

- a. Pemilih Rasional, adalah pemilih yang memfokuskan perhatian pada faktor isu dan kebijakan kontestan dalam menentukan pilihan.
- b. Pemilih Emosional, adalah pemilih yang dipengaruhi oleh perasaan-perasaan tertentu yang ditentukan oleh faktor personalitas kandidat dalam menentukan pilihannya.
- c. Pemilih Sosial, adalah pemilih yang mengasosiasikan kontestan pemilu dengan kelompok-kelompok sosial tertentu dalam menentukan pilihannya.

d. Pemilih Situasional, adalah pemilih yang dipengaruhi faktor-faktor situasional atau kondisi tertentu dalam menentukan pilihannya.

2. Pengertian Pemilih Pemula

Menurut pasal 1 ayat (22) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 bahwa pemilih adalah Warga Negara Indonesia yang telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin. Kemudian dalam pasal 19 ayat (1 dan 2) diterangkan bahwa pemilih yang mempunyai hak memilih adalah warga Negara Indonesia yang didaftar oleh penyelenggara pemilu dalam daftar pemilih dan pada hari pemungutan suara genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin.

Rusli Karim dalam Surbakti (1997 : 32) mengkategorikan pemilih pemula sebagai pemuda-pemudi dalam usia yang masih remaja dan sarat idealisme, mereka senantiasa dianggap masih suci (*vasted interest*) atau belum terkontaminasi oleh kepentingan-kepentingan birokrasi dan kekuasaan. Sudah menjadi *axioma* bahwa sering tidak bisa dihindari ketika menjelang pemilihan kaum muda senantiasa menjadi objek sasaran yang diincar oleh para calon.

Berdasarkan pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa pemilih pemula adalah warga negara yang didaftar oleh penyelenggara pemilu dalam daftar pemilih, yaitu para remaja dengan rentang usia 17-21 tahun yang baru mengikuti pemilu (memberikan suara) pertama kali sejak pemilu diselenggarakan.

C. Tinjauan Pemilihan Umum

Pemilihan umum merupakan sarana demokrasi yang penting karena merupakan perwujudan nyata keikutsertaan rakyat dalam kehidupan bernegara. Oleh karena itu pemilihan umum merupakan tolak ukur sejauh mana negara itu telah benar-benar melaksanakan demokrasi. Pemilihan umum menunjukkan bahwa kekuasaan politik berasal dari rakyat dan dipercayakan demi kepentingan rakyat dan bahwa kepada rakyatlah para politisi mempertanggungjawabkan tindakan-tindakan mereka.

Sementara itu pengertian Pemilu Menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berdasarkan Pancasila Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Azas Pemilu diselenggarakan secara demokratis dan transparan, jujur dan adil dengan mengadakan pemberian dan pemungutan suara secara langsung, umum, bebas, dan rahasia. Berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilu, pemilu menggunakan azas sebagai berikut :

1. Jujur, yang berarti bahwa penyelenggara/pelaksana, pemerintah dan partai politik peserta Pemilu, pengawas, dan pemantau Pemilu, termasuk pemilih serta semua pihak yang terlibat secara tidak langsung harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Adil, berarti dalam penyelenggaraan Pemilu setiap pemilih dan Parpol peserta Pemilu mendapat perlakuan yang sama serta bebas dari kecurangan pihak manapun.
3. Langsung, yaitu rakyat pemilih mempunyai hak untuk secara langsung memberikan suaranya sesuai dengan kehendak hati nuraninya, tanpa perantara
4. Umum, pada dasarnya semua warga negara yang memenuhi persyaratan minimal dalam usia, yaitu sudah berumur 17 tahun atau telah pernah kawin, berhak ikut memilih dalam Pemilu. Warga negara yang sudah berumur 21 tahun berhak dipilih.
5. Bebas, setiap warga negara yang memilih menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun. Dalam melaksanakan haknya setiap warga negara dijamin keamanannya, sehingga dapat memilih sesuai dengan kehendak hati nurani dan kepentingannya.
6. Rahasia, yang berarti dalam memberikan suaranya, pemilih dijamin bahwa pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak manapun dan dengan jalan apapun. Azas rahasia ini tidak berlaku lagi bagi pemilih yang telah keluar dari tempat pemungutan suara yang secara suka rela bersedia mengungkapkan pilihannya kepada pihak manapun. (<http://sma6semarang.wordpress.com>) diakses 28/03/2012/20.43.

D. Tinjauan Tentang Pemilihan *Peratin*

Pemilihan Kepala Desa, atau seringkali disingkat Pilkades, adalah suatu pemilihan Kepala Desa secara langsung oleh warga desa setempat. Berbeda dengan Lurah yang merupakan Pegawai Negeri Sipil, Kepala Desa merupakan jabatan yang dapat diduduki oleh warga biasa, maka dari itu mekanisme perekrutan untuk kepala desa dilakukan dengan cara pemilihan umum secara langsung.

Adapun ketentuan yang mengatur tentang pemilihan kepala desa didasarkan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa, yaitu :

1. BPD memproses pemilihan kepala desa, paling lama 4 (empat) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan kepala desa.

2. Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk desa dari calon yang memenuhi syarat; Pemilihan Kepala Desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil; Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahap pencalonan dan tahap pemilihan.
3. Kepala desa menjabat maksimal dua kali
4. Untuk pencalonan dan pemilihan Kepala Desa, BPD membentuk Panitia Pemilihan yang terdiri dari unsur perangkat desa, pengurus lembaga kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat. Panitia pemilihan melakukan pemeriksaan identitas bakal calon berdasarkan persyaratan yang ditentukan, melaksanakan pemungutan suara, dan melaporkan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada BPD.
5. Panitia pemilihan melaksanakan penjaringan dan penyaringan Bakal Calon Kepala Desa sesuai persyaratan; Bakal Calon Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan.
6. Calon Kepala Desa yang berhak dipilih diumumkan kepada masyarakat ditempat-tempat yang terbuka sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
7. Calon Kepala Desa dapat, melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat; Calon Kepala Desa yang dinyatakan terpilih adalah calon yang mendapatkan dukungan suara terbanyak; Panitia Pemilihan Kepala Desa melaporkan hash pemilihan Kepala Desa kepada BPD; Calon Kepala Desa Terpilih sebagaimana dirnaksud pada ayat; ditetapkan dengan Keputusan BPD berdasarkan Laporan dan Berita Acara Pemilihan dari Panitia Pemilihan.
8. Calon Kepala Desa Terpilih disampaikan oleh BPD kepada Bupati/Walikota melalui Camat untuk disahkan menjadi Kepala Desa Terpilih.
9. Bupati/Walikota menerbitkan Keputusan Bupati/Walikota tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih paling lama 15 (lima belas) hari terhitung tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari BPD.
10. Kepala Desa Terpilih dilantik oleh Bupati/Walikota paling lama 15 (lima belas) hari terhitung tanggal penerbitan keputusan Bupati/Walikota.
11. Masa jabatan Kepala Desa adalah 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan berikutnya.

Berdasarkan penjelasan di atas dalam hal ini yaitu pemilihan *peratin Pekon* Rawas, sesuai ketentuan umum Perda Kabupaten Lampung Barat Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Pemilihan dan Penetapan *Peratin*, disebutkan bahwa *peratin* adalah Kepala *Pekon* dalam Kabupaten Lampung Barat, sementara

Pekon merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dari penjelasan tersebut diketahui bahwa *peratin* merupakan pemimpin dalam suatu kesatuan masyarakat yang disebut *Pekon*.

Pencalonan *Peratin* ini harus memenuhi beberapa persyaratan sebagaimana yang disebutkan dalam Perda Kabupaten Lampung Barat Nomor 15 Tahun 2006 Pasal 9 ayat 1 bahwa yang dapat dipilih menjadi *Peratin* adalah Penduduk *Pekon* Warga Negara Republik Indonesia yang:

- a. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang maha Esa.
- b. Setia dan taat kepada Pancasila, undang-undang dasar 1945, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia;
- c. Tidak terlibat langsung atau tidak dalam kegiatan yang mengkhianati Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang 1945;
- d. Berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau sederajat dan khusus untuk *Pekon* sebagai ibukota kecamatan sekurang-kurangnya SLTA/sederajat.
- e. Berumur sekurang-kurangnya 25 tahun dan setingginya 60 tahun;
- f. Sehat Jasmani dan rohani;
- g. Nyata-nyata tidak terganggu jiwa dan ingatannya
- h. Berkelakuan baik, jujur dan adil;
- i. Tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana;
- j. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- k. Mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di *pekon* setempat;
- l. Bersedia dicalonkan menjadi *Peratin*;

Secara umum pemilihan *peratin* secara langsung dilakukan dengan tujuan untuk memilih pemimpin *pekon* yang berkualitas. Kualitas pemimpin dapat juga diukur dengan instrumen seperti tingkat pendidikan dan kompetensi,

dengan dilakukannya pemilihan secara langsung maka diharapkan bisa mendatangkan atau menciptakan *peratin* yang memiliki latar belakang pendidikan dan wawasan yang tinggi, yang mengerti akan tugas, wewenang dan tanggung jawabnya. Sehingga mampu menjawab tantangan tugas di masa yang akan datang seperti yang diharapkan oleh masyarakat.

E. Kerangka Pikir

Keikutsertaan warga negara dalam suatu pemilihan umum terutama bagi pemilih pemula dalam hal ini pemilihan *Peratin* Pekon Rawas Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Lampung Barat 2012 merupakan serangkaian kegiatan keputusan yakni apakah memilih ataupun tidak memilih dalam pemilihan umum.

Berkaitan dengan pengertiannya pemilih pemula adalah warga negara Indonesia yang pada hari pemilihan atau pemungutan suara adalah warga negara Indonesia yang sudah genap 17 tahun dan atau lebih sudah/pernah kawin yang mempunyai hak pilih, dan sebelumnya belum termasuk pemilih karena ketentuan undang-undang pemilu.

Pemilihan *Peratin* Pekon Rawas Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Lampung Barat berlangsung pada tanggal 23 Februari 2012. Pemilihan *peratin* kali ini diikuti oleh dua orang kandidat yang menjadi calon *peratin* yaitu :

1. Edy Siskendi, S.Sos
2. Nasib Mulyadi

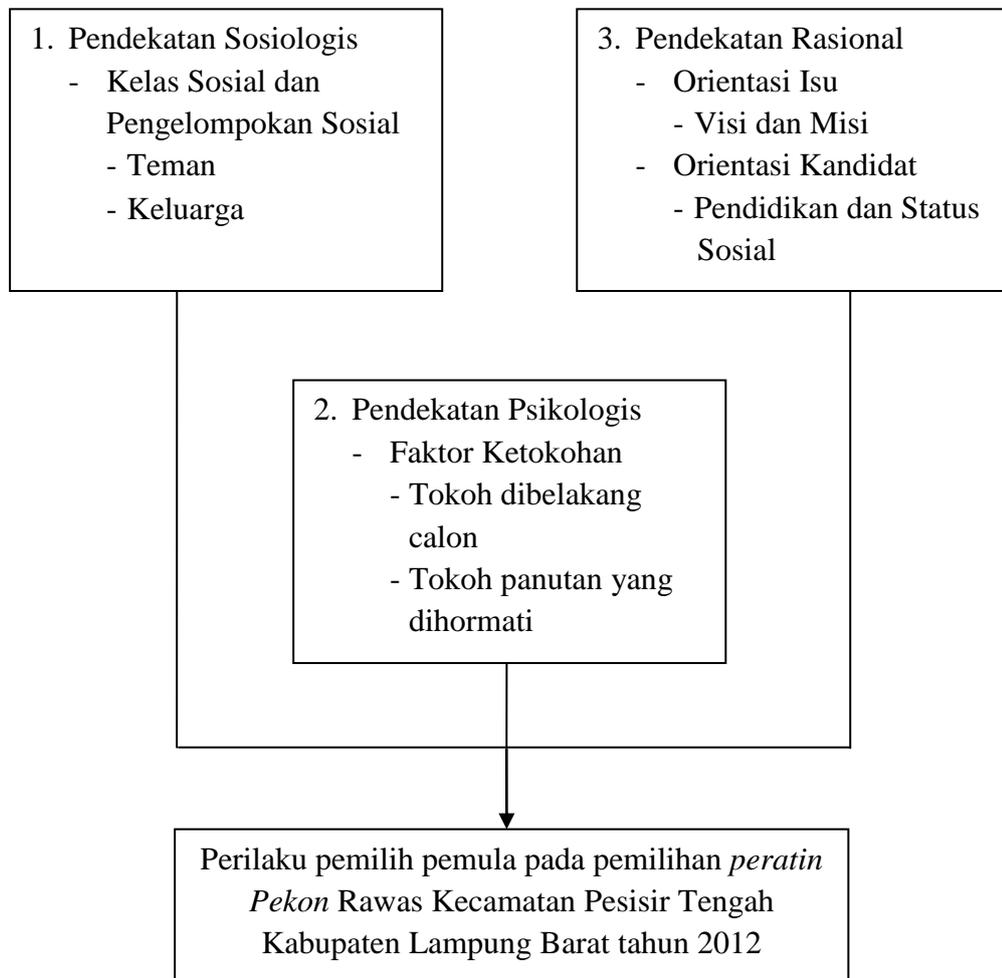
Berbicara mengenai pemilihan umum secara langsung bagi kepala desa atau *peratin* tentu tidak lepas berbicara mengenai pemilih, seperti dalam hal ini perilaku pemilih pemula yaitu diukur dengan kelas sosial dan pengelompokan sosial dengan indikator dilihat dari hubungan pertemanan, kekeluargaan dan kekerabatan dengan calon *peratin*. Ketokohan yang diukur dari keterikatan emosional pemilih terhadap tokoh tertentu baik calon ataupun tokoh-tokoh pendukung calon yang akan dipilih yang dirasakan dekat atau memiliki kharisma yang kuat ditengah masyarakat serta saran atau pilihan tokoh panutan yang dihormati oleh pemilih. Orientasi isu yang diukur dari pengetahuan dan pemahaman serta ketertarikan pemilih terhadap program yang ditawarkan calon *peratin*, serta orientasi kandidat yang diukur dari kualitas kandidat meliputi latar belakang pendidikan dan kedudukan sosial ekonomi calon *peratin*. Untuk mengkaji dan memahami perilaku pemilih berdasarkan indikator-indikator tersebut digunakan tiga pendekatan besar, yaitu :

1. Pendekatan Sosiologis
2. Pendekatan Psikologis
3. Pendekatan Rasional

Penelitian ini menggunakan tiga pendekatan perilaku pemilih seperti yang ada di atas dikarenakan pendekatannya harus disesuaikan dengan kondisi lokasi penelitian yang berada di pedesaan sehingga tendensi memilih lebih mengarah pada ketiga pendekatan tersebut dan objek penelitian yakni pemilihan *peratin* atau setingkat kepala desa, dimana pendekatan *marketing*

tidak begitu ditampakkan oleh kontestan mengingat ruang lingkupnya tidak terlalu luas.

Menggunakan pendekatan-pendekatan yang ada diatas, yaitu tiga pendekatan besar dalam perilaku pemilih maka akan diketahui perilaku pemilih pemula dalam pemilihan *Peratin Pekon Rawas* Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Lampung Barat 2012. Agar lebih mudah dalam memahami kerangka pikir dalam penelitian ini, berikut adalah bagan dari kerangka pikir penelitian ini :



Gambar 1. Kerangka Pikir